

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*, Nusamedia, Bandung

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perzinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Alw, L. T, 2020, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation Di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum)*, Pusaka Media, Bandar Lampung.

Atamimi, A, Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Asshiddiqie Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press.

_____, et al., 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.

Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Butar Butar Franky, et.al., 2022, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Airlangga University Press, Surabaya

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

M. Manulang, 1983, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.



_____, 1989, *Organisasi Teori, Struktur dan Proses. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta.

Iqbal Muhammad, 2001, *Fiqh Siasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung

Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta

Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia*, Jogjakarta

Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,

Soekanto Soerjono, 1977, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika

Yance Arizona, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STP Press.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja grafindo Persada, Jakarta:

Zain Badudu, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Zulkifli Aspan. "Konstitusionalisasi tanggung jawab negara terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup." *Amanha Gappa* (2022): 149-155.

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .



Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Risalah Sidang Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024, Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Jurnal

Anggun Nadia Fatimah, et.al., 2023, *Peran dan Fungsi Praktisi Hubungan Masyarakat di Organisasi Nirlaba*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6),

Ahmad Redi, Luthfi Marfugah, 2021, *Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2)

Black's Law Dictionary, 2004, *Eight Edition*, (St. Paul: West Publishing Co)

ElLabeth Bastida, 2002, *Fundamentals of Mineral Law and Policy*, (Dundee: Centre for Energy, Petroleum & Mineral Law & Policy (CEPMLP).

Friskilia Darongke, et al., 2020, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia*, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 10 Nomor 3.

Hery Basuki, 2015, *Proses Pengambilan Keputusan di Organisasi Kemasyarakatan*, *Jurnal Translitera*, Edisi 3

Mutiara Fajriatul Izza Putri, et al., 2024, *Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan "Keagamaan" di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 tahun 2024* *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Volume 02 nomor 02, Pp. 214-224.



N.M, Angelia, et al., 2014, *Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana*. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Volume 2, Nomor 2.

Ramadhanil Haq, et al., *Faktor-Faktor Determinan Penolakan Ormas Islam Terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Muhammadiyah Hizbut Tahrir Indonesia)*, Arikel Ilmiah.

Rahmat Bijak Setiawan Sapil, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, 2023, *Kepastian Hukum Kebijakan Basis Free On Board Dalam Transaksi Jual Beli Nikel Melalui Pemberlakuan Harga Patokan Mineral*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan.10(2)

Satrya Pangadaran Marpaung, 2015, *Organisasi Kemasyarakatan Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia*, Law Review, Volume. XV Nomor 1 hlm. 205.

Zen Lutfulloh, Wahyu Donri, 2021, *Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Kekayaan Alam Kepulauan Sangihe*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja

Website

Firda Dwi Muliawati. (2024). "Kenapa Tambang Batu Bara yang Dibagi-bagi ke NU Cs? Ini Kata ESDM", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240607171039-4-544836/kenapa-tambang-batu-barayang-dibagi-bagi-ke-nu-cs-ini-kata-esdm>, diakses pada tanggal 26 November 2024, pukul 03.09 WITA.

https://s.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/11258_Risalah-pdf_PERKARA%20NOMOR%2077.PUUXII.2024%20tgl.%2018%20November%202024.pdf, diakses pada 26 November 2024, pukul 12.44 WITA.

<https://muhammadiyah.or.id/anggaran-dasar/> diakses pada tanggal 15 Januari 2025



www.tempo.co/ekonomi/daftar-ormas-agama-yang-tolak-dan-rima-izin-tambang-lokawi-49749 diakses pada tanggal 15 Januari 2025

Riló Pambudi, 2024, "Publik Ragu soal Kapasitas Pengelolaan Tambang, Ketum PBNU: Kita Sudah Punya Kapasitas Profesional Untuk Itu, Ga Percaya?", <https://www.tvonenews.com/ekonomi/218574-publik-ragu-soal-kapasitas-pengelolaan-tambang-ketum-pbnu-kita-sudah-punya-kapasitas-profesionaluntuk-itu-ga-percaya?page=all>, diakses pada tanggal 26 November 2024, di akses pada pukul 04.03 WITA.

